KIPRAH POLITIK PARTAI GERINDRA
(Studi Tentang Strategi Pemenangan Calon Legislatif Terpilih Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 di Kota Salatiga)

Oleh:

Carry Heart Kandowangko[1], Pamerdi Giri Wiloso[2], dan Elly E. Kudubun[3]

ABSTRACT

Elections (elections) in addition to the circulation succession is understood as a five-yearly political as well as a means of popular sovereignty, and "judgment day." The day of the judgment in question is the decision of the electorate to choose or not choose a candidate and a certain party in the elections. Generra party in Salatiga is a newcomer to accept the consequences of judgment day in the 2009 election in the absence of prospective members that qualify as his legislative members of DPRD Salatiga. But the reality of defeat turned the elections in 2014, with 4 chairs of DPRD of Salatiga. "It's a victory strategy, candidates become relevant for the investigation. Researchers used the concept of habitus, capital, and the realm of actor Pierre Bourdieu as a tool of analysis.

This research aims to answer how the strategy of winning candidate elected legislative members from the party of Generra, and factors that affect the winning strategy. research method used was qualitative research with the kind of descriptive and eksplanatory.

Based on the results of the analysis, some important findings in this study are: a). strategy of appeasement actors largely determined by the habitus and capital utilization of economic, social, cultural, and symbolic by the actors; b). capital-capital utilization in order to seize the capital in a field looks in two pattern (the actor uses the power of capital economic, cultural, and symbolic as the base form, build and exploit the network in order to gain recognition and legitimacy of the voters to add and accumulate capital-capital and c). dominant factors affecting the image of the actors is: victory party Gerindra and figure of Prabowo, the image of the actor, and a solid team to win.

Keywords: *Legislative Elections, Candidates Elected, Generra DPC, Winning Strategies, Habitus, Capital, The Realm Of The Actor*

---

[1] Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom), Program Studi Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

[2] Staff pengajar Fiskom UKSW

[3] Staff pengajar Fiskom UKSW

1. LATAR BELAKANG

Di negara-negara penganut demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk turut menentukan wakil-wakilnya, bahkan perlu berpartisipasi "mempengaruhi" perumusan *public policy* (Suwondo, 2005). Dengan meluasnya hak pilih bagi rakyat, maka kegiatan politik mulai berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara pendukung menjelang masa pemilihan umum, dengan demikian lahirlah partai politik (Dahl, 2001; Sanit, 1997). Dalam konsepsi seperti ini, maka partai politik umumnya dianggap sebagai manivestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.

Dalam konteks Indonesia, kemunculan partai-partai (politik) pada awalnya adalah bertujuan "mempercepat" pergerakan nasional menuju cita-cita kemerdekaan, dan dalam banyak aspek menolak untuk terlibat atau bekerjasama dengan kolonial (Ingleson, 1993; Leclerc, 2001; Alam, 2003). Perkembangan selanjutnya, baik Orde Lama maupun Orde Baru, demokrasi Indonesia sempat "terkebiri". Fenomena ini berimplikasi pada tuntutan refomasi dan perombakan sistem politik dan demokrasi yang memihak rakyat, maka "lahirlah" beragam partai sebagai suatu instrumen utama bagi demokratisasi. Parpol pada hakikatnya merupakan elemen penggerak sistem politik, sekaligus alat untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, dengan mewakili kepentingan tertentu, memobilisasi masyarakat, dan melakukan kaderisasi demi melahirkan pemimpin (Macridis, 1998 dalam Koiridun, 2004: 68). Salah satu dari kemunculan partai itu adalah partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Partai GERINDRA merupakan partai pendatang baru dalam panggung politik Indonesia, yang baru terbentuk bulan Desember tahun 2007. Tokoh-

tokoh pendiri partai antara lain: Prabowo Subianto[4], Hashim Djojohadikusumo[5], Fadli Zon[6] dan Muchdi PR7[7]. Prabowo Subianto ketika diwawancarai secara ekslusif oleh Dalton Tononaka, yang disiarkan Metro TV 2009[8], mengemukakan: "Partai Gerindra didirikan dengan dasar pikir, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan; sistem politik tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari kemelaratan; bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar, yang berakibat menggelembungnya jumlah rakyat miskin dan menganggur".

Dengan visi dan misi yang diembannya, partai Gerindra kemudian ikut bertarung dalam pemilu Legislatif 2009. Pertarungan pertama ini menghasilkan suara sebanyak 4.646.406 atau 4,46%. Perolehan suara ini melewati 2,5% *parlaimentary treshold* yang disyaratkan UU No. 10 Tahun 2008. Selain itu, di tingkat regional, khususnya Jawa Tengah, partai Gerindra juga berhasil memperoleh suara sebanyak 800.959, yang dikonversi menjadi 9 kursi anggota legislatif Provinsi Jawa Tengah peride 2009-2014. Namun demikian, pada level lokal (Kota Salatiga), perjuangan partai Gerinda tanpa kemenangan.

---

[4] Diberhentikan (mantan) dari jabatan Danjen Kopassus dan kemudian "pindah" ke luar negeri dan menjadi pengusaha selanjutnya kembali ke Indonesia dan menjadi anggota Dewan pembina Partai Golkar sekaligus Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI).

[5] Salah satu pengusaha sukses di Indonesia, dia juga adalah adik mantan Denjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

[6] Mantan aktivis yang kemudian terjun ke dunia politik. Fadli Zon juga adalah pendiri dan pemilik lembaga Institute for Policy Studies (IPS), lembaga yang menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh yang membahas pembentukan Gerindra.

[7] Mantan petinggi TNI, berpangkat Mayjen, pernah juga menjabat sebagai Komandan Kopassus TNI AD ketika ditinggal Prabowo Subianto, pernah juga menjabat Deputi Badan Intelijen Indonesia. Dia juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Munir (aktivis HAM) namun divonis bebas oleh majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

[8] Hasil wawancara ini telah diunggah ke YouTube, dan dapat diakses dengan judul "wawancara eksklusif dengan Prabowo Subianto tentang Partai Gerindara"

Pertarungan kedua dalam pemilu Legislatif tahun 2014, partai Gerindra berhasil sebagai pemenang ketiga setelah PDIP dan partai Golkar, dengan perolehan suara 11,81% (14.760.371), sedangkan partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu 2009, mengalami penurunan suara yang sangat drastis. Kemenangan Gerindra dalam pemilu ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga terjadi pada tingkat lokal, yakni Salatiga. Di Kota Salatiga, partai Gerindra memperoleh 3.746 suara dan berhasil menempatkan 4 orang kadernya sebagai anggota legislatif kota Salatiga. Perolehan kursi ini melebihi hasil perolehan kursi partai Demokrat yang sejak pemilu tahun 2004 di Salatiga perolehan kursinya cenderung mengalami peningkatan, yakni tahun 2004 memperoleh 2 kursi, 2009 memperoleh 4 kursi, namun pada pemilu 2014, Demokrat bernasib sial karena hanya memperoleh 3 kursi, dengan jumlah suara 2.573 (KPU Kota Salatiga, 2014). Fenomena kemenangan Gerindra di Salatiga membuat penelitian ini menjadi relevan.

Elaborasi lanjut tentang latar belakang di atas memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana strategi pemenangan calon anggota legislatif terpilih partai Gerindra dalam memenangkan kursi DPRD pada pemilu legislatif 2014 di Kota Salatiga?, 2). Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi strategi pemenangan anggota legislatif terpilih partai Gerindra dalam memenangkan pemilu Legislatif 2014 di Kota Salatiga?.

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendiskripsikan strategi strategi pemenangan calon anggota legislatif terpilih Partai Gerindra dalam memenangkan kursi DPRD pada pemilu legislatif 2014 di Kota Salatiga; dan 2). Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemenangan anggota Legislatif terpilih partai Gerindra dalam memenangkan pemilu legislatif 2014 di Kota Salatiga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Makna Pemilihan Umum

Politik adalah suatu usaha yang selalu bermuka dua (seperti Dewa Janus) antara mengabdi kepada kepentingan rakyat demi kebaikan bersama atau mengabdi kepada kepentingan individu atau kelompok yang dapat bersifat menindas dan menyengsarakan orang lain (Duverger, 2000: 27-30). Dalam pengertian seperti ini, maka politik (praktis)–yang salah satunya diupayakan lewat pemilu–pada intinya bertujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan untuk kebaikan umum, maka Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dimaknai sebagai proses politik yang bertujuan membatasi (waktu) kekuasaan seseorang atau sekelompok orang.

Dengan "hadirnya" reformasi, sistem pemilihan umun di Indonesia mengalami berubahan dari yang tidak langsung menjadi langsung, berbeda dengan era Orde Lama maupun Orde Baru, yang mana pemilu legislatif maupun pemilu presiden dilakukan secara tidak langsung karena kekuasaan penuh menentukan calon ada pada partai politik dan rakyat hanya diperbolehkan memilih partai (Upe, 2008). Dengan demikian, pemilu baik langsung maupun tidak langsung, baik LUBER maupun gabungan LUBER dan JURDIL selalu perlu dimaknai sebagai: proses sirkulasi kekuasaan politik lima tahunan, sarana kedaulatan rakyat, dan hari penghakiman oleh rakyat (Suwondo, 2005).

2.2 Pemilu Legislatif: Arena Pertarungan Aktor

Berangkat dari pemikiran Bordiue tentang *field* (ranah), aktor atau calon legislatif bertarung bukan hanya pada tingkatan eksternal "dengan calon legislatif partai lain", melainkan juga pada tingkatan internal "antar calon legislatif partai", maka, *field* memfasilitasi strategi, modal para aktor. Bourdieu memahami ranah sebagai: 1). Tempat persaingan dan perjuangan para aktor; dan 2). Medan kekuatan. *Field* menjadi tempat perjuangan antar individu dan antar kelompok (Ritzer, 2009; Haryatmoko, 2003; Takwin, 2003). Orang

biasanya tidak sengaja masuk ke dalam permainan karena ketika dilahirkan sudah menjadi bagian dari permainan itu. Orang masuk ke dalam permainan biasanya bukan sebagai tindakan penuh kesadaran, individu-individu sudah dilahirkan di dalam permainan, dengan permainan, dan hubungan kepercayaan (*trust*). Dalam konsepsi seperti ini, aktor perlu membangun basis jaringan atas dasar *trust* untuk dapat selalu "bermain" dalam ranah.

Ranah merupakan arena pertarungan simbolik, dalam rangka mendapat pengakuan atau legitimasi. Dalam ranah para aktor memproduksi berbagai wacana sebagai basis diri untuk mendapatkan legitimasi. Aktor yang menempati posisi dominan atau memiliki berbagai macam modal akan memproduksi *orthodoxa*, yaitu, wacana yang mendukung keberadaan wacana dominan atau *doxa*, sedangkan aktor yang menempati posisi marjinal (modalnya) akan memproduksi *heterodoxa* yaitu wacana menentang keberadaan *doxa*, (Haryatmoko, 2003:14-15; Takwin, 2003, Ritzer, 2009). Dalam realitas politik (pemilu legislatif), produksi wacana ini saling bertarung guna mendapatkan legitimasi kekuasaan politik.

2.2.1 *Habitus:* Modal Utama Aktor dalam Pertarungan

Bourdieu memandang habitus sebagai hasil keterampilan yang terbatinkan menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam proses perolehan keterampilan itu struktur-struktur yang dibentuk berubah menjadi struktur-struktur yang membentuk (Takwin, 2006; Fashri, 2007; Ritzer, 2009). Contohnya, seorang pianis selalu berupaya membatinkan tanda-tanda dan pembatasan-pembatasan musikalnya (struktur-struktur yang dibentuk), maka pianis itu dapat menyusun komposisi, mencipta dan improvisasi (struktur-struktur yang membentuk). Intinya, habitus merupakan kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif. Dengan demikian,

aktor dengan habitus tertentu (yang dimilikinya) akan menentukan kedudukannya di dalam ranah (*field*). Di satu sisi, sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku dan di lain sisi modalitas praktiknya mengandalkan improvisasi dan bukan pada kepatuhan akan aturan-aturan, jadi ada gerak timbal-balik, objektif yang dibatinkan dan gerak subjektif (persepsi, pengelompokkan, evaluasi) yang menyingkap hasil pembatinan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pemilu legislatif sebagai ranah (*field*) yang merupakan arena pertarungan strategi harus didukung oleh jumlah dan struktur modal yang dimiliki oleh aktor. Modal-modal itu antara lain : modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik (Haryatmoko, 2003; Ritzer, 2009). Modal sebagai sarana mencapai kekuasaan dapat dilihat dari pembentukan makna politis yang mana di dalamnya merepresentasikan sosok aktor.

2.2.2 Habitus x Modal + Ranah = Praktek: Elaborasi *Actor-Network-Theory* (ANT)

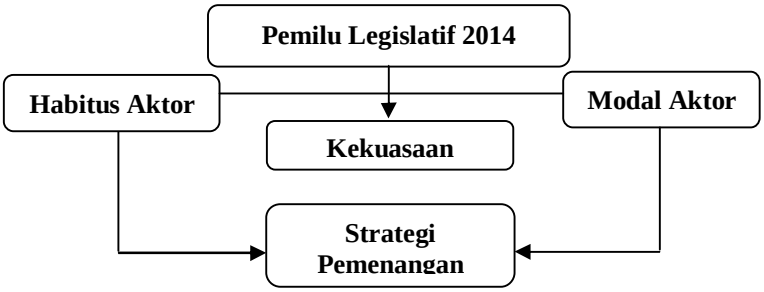
Dalam konsep tematik Bourdieu tentang "praktek" yang merupakan konsekuensi logis dari habitus, modal dan ranah, maka upaya (praktek) para aktor (manusia) memanfaatkan habitus dan modal untuk mendapatkan pengakuan sosial, salah satu syaratnya, membangun jaringan dengan memanfaatkan modal. Pendekatan ini berbeda dengan perspektif ANT, karena itu, kemunculan ANT bertujuan "memperbaiki" perspektif Bourdieu yang mambatasi aktor hanya sebatas manusia, maka ANT melihat aktor tidak hanya sebatas manusia namun juga termasuk non-manusia, yakni institusi-institusi, mesin-mesin, dan organisasi-organisasi. Dengan demikian, Ke-aktor-an merupakan produk atau efek dari suatu jejaring material yang heterogen, jadi, praktik ANT merupakan interaksi melalui berbagai jenis perangkat dalam sebuah tatanan sosial (Latour, 2005: 243; Maanen, 2009: 84).

Berdasarkan pemehaman di atas, maka konsepsi teoritik Bourdieu tentang habitus perlu diperluas tidak hanya dimiliki aktor manusia, namun habitus perlu juga dilihat sebagai "milik" aktor non-manusia, maka strategi yang dipakai para aktor bergantung pada jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam posisinya di ruang sosial. Dalam ANT, manusia memiliki *inner life* seperti kegiatan mental dan kegiatan kognisi, tetapi yang ditekankan ANT adalah sejauh agen sosial menjadi perhatian, *agency* itu diraih bukan karena terwujud di dalam tubuh, melainkan terbentuk atas jejaring dari relasi-relasi heterogen terpolakan atau merupakan efek dari jejaring. Dengan kata lain, suatu aktor juga selalu merupakan jejaring-jejaring aktor. Hal ini juga berlaku bagi organisasi dan institusi yang semuanya merupakan peranan berpola yang dijalankan oleh orang-orang, mesin-mesin, dokumen-dokumen, aturan-aturan, gedung-gedung, dan lainnya, demikian pula mesin (M. Anggorowati, 2005).

Perspektif dasar ANT adalah menggabungkan manusia dan non-manusia dalam sebuah *framework* konseptual (*principle of generated symmetry*). Artinya manusia dan non-manusia sama-sama penting dalam suatu jaringan, dan dalam hal ini keduanya dapat bertindak sebagai *actant* (aktan)–aktor yang mampu mengontrol aktor lain. Dengan kata lain, aktan memiliki kemampuan untuk bergerak masuk dan keluar suatu jaringan berdasarkan kemauan dan kepentingannya. Karena itu aktan dipahami sebagai elemen utama dan menjadi penggerak dalam jaringan. Dalam terminologi ini, tidak ada lagi perbedaan antara subjek dan objek, atau subjektif dan objektif; aktor manusia dan aktor non-manusia, keduanya menjadi sama-sama penting dan setara (Maanen, 2009). Partai politik (Gerindra), dalam perspektif ANT akan dianalogikan sebagai sebuah mesin dengan elemen-elemennya, dan semuanya (termasuk partai Gerindra) memiliki kesempatan yang sama pula untuk menjadi aktan (aktor pengendali), maka strategi masing-masing aktor untuk berjejaring dan menjadi aktan akan menjadi penentu kemenangan dalam *field*–pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, maka diasumsikan bahwa Pemilu Legislatif tahun 2014 merupakan arena (*field*) para aktor untuk bertarung dengan strategi tertentu guna mengakumulasikan modal (kekuasaan–kekuasaan). Habitus dan modal awal yang dimiliki aktor "dilepas" ke dalam ranah pertarungan guna membangun atau membentuk jaringan sosial (strategi pemenangan). Tujuan akhir dari proses ini adalah kekuasaan untuk mengakumulasikan modal, kemudian kembali melepaskan modal ke dalam ranah dengan tujuan mempertahankan legitimasi konstituen. Selain itu, mengikuti perspektif ANT, maka masing-masing elemen dalam *field* dimaknaipula sebagai aktor yang memiliki posisi setara.

Kerangka Pikir Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme (Salim, 2006), guna mengkonstruksi pemilu legislatif sebagai sebuah realitas pertarungan (*field*) para aktor (calon) dalam memperebutkan kekuasaan. Fokus analisisnya diupayakan pada konstruksi realitas strategi pemenangan calon terpilih partai Gerindra dalam pileg 2014 di Kota Salatiga. Alasan utama memilih kota Salatiga sebagai lokus penelitian dikarenakan rekam jejak partai Gerindra yang mengalami kekalahan pada pemilu 2009, tetapi pada pemilu 2014 berhasil meraih 4 kursi DPRD Salatiga.

Kosekuensi logis dari pendekatan ini, maka motede kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatori digunakan sekaligus untuk mendeskripsikan strategi pemenangan calon terpilih dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Schulte, 1973: 78-79). Dengan demikian, proses pemilu legislatif 2014 di Salatiga, partai politik khususnya partai Gerindra dan aktivitas para calonnya akan dijadikan unit amatan, dan strategi pemenangan calon terpilih beserta faktor yang mempengaruhinya merupakan fokus/ unit analisis (Ihalauw, 2003: 174-178) dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan mengikuti alur penelitian kualitatif, yakni berbasis pada data lapangan. Artinya analisis dilakukan bersamaan pada saat proses penelitian berlangsung, dengan mendasarkan diri pada tiga tahapan, yaitu: melakukan reduksi data dilapangan–memperbandingkan hasil reduksi tersebut, kemudian menampilkan (*display*) dalam bentuk topik-topik analisis–memperbandingkan topik-topik analisis dengan realitas yang terjadi, selanjutnya melakukan verifikasi (Bungin, 2003) sebagai sebuah bentuk konstruksi terhadap realitas strategi pemenangan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2014 khususnya partai Gerindra di Salatiga.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi dan Modal Aktor Calon Legislatif Terpilih pada Pileg 2014 dan Faktor yang Mempengaruhinya

4.1.1 Trajektori Aktor dan Pertarungan Internal Partai

Trajektori secara sederhana dimaknai sebagai sejarah kehidupan aktor dengan segala perlengkapan *habitus* dan modal yang dimilikinya dalam memasuki pertarungan di dalam *field* (ranah), baik ranah ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam kaitan ini, analisis difokuskan pada trajektori aktor Partai Gerindra yang menang dalam memperebutkan kekuasaan dalam pemilu legislatif (pileg) tahun 2014 di Salatiga, diantaranya:

Ir.Hj. Diah Sunarsasi, perempuan kelahiran Nganjuk Jawa Timur, 25 Juli 1960 ini menikah dengan Ir.H. Miftah Hudin Afandi, SE., SH., MH[9], buah pernikahan mereka adalah 3 orang anak dan saat ini ketiganya sedang tinggal di Jakarta. Menurut ibu Diah Sunarsasi, semua anaknya sedang melanjutkan pendidikan di luar Salatiga, bahkan di luar Jawa Tengah. Dua orang anaknya (anak pertama dan kedua) telah menyelesaikan pendidikan (kuliah) kedokteran dari Universitas Indonesia dan yang satunya lagi masih atau sedang berkuliah juga di Jakarta.

Kesan pertama dengan Ir.Hj. Diah Sunarsasi, tanggal 10 September 2014 adalah cantik, menawan dan *fashionable*. Namun pertemuan pertama tidak serta-merta terjadi wawancara, beliau menyarankan untuk membuat janji dengan Sekretaris, selanjutnya pertemuan tanggal 15 September 2014, malam hari di rumah beliau. Rumah yang sederhana untuk ukuran seorang mantan Wakil Walikota. Menurutnya rumah tersebut adalah rumah dikontrak untuk ditinggal ketika berada di Salatiga, beliau pun tinggal sendiri karena sang suami di tempat tugas dan anak-anak di Jakarta. Dalam wawancara selama 2,5 jam itu, ibu Diah memperlihatkan gaya bicara yang *blak-blakan, cuek,* arogan dan *jutek* atau boleh dikatakan komunikasinya kaku. "Mas, intinya saya tidak mau bilang besarannya berapa, tapi bayangkan saja tim sukses saya jumlahnya 300[10] orang kira-kira dananya berapa!?". Kata politisi kelahiran Nganjuk ini.

---

[9] Suaminya adalah salah satu elit di Perum Perhutani, yang dalam tuturan ibu Diah telah bertugas di 16 wilayah berbeda di Indonesia. Dengan kata lain, keluarga yang berpindah-pindah. Selain itu menurut beberapa sumber suami beliau memiliki kekuatan *loby* yang tinggi kepada partai politik diantaranya Golkar dan PDIP baik ditingkat pusat (DPP) maupun ditingkat regional (DPD). Saat ini, suami Diah Sunarsasi menempati posisi Ketua Dewan Penasihat DPC Gerindra.

[10] Tim yang dimaksud adalah Badan Kemenangan Diah Sunarsasi (BKDS) yang dibentuk sejak tahun 2010 untuk suksesi Pilkada Salatiga 2011 yang diikutinya, namun kalah. Tim ini kemudian dihidupkan kembali tahun 2013 untuk seksesi Pileg 2014. Sebelumnya di tahun 2012 ketika Diah Sunarsasi secara "ajaib" memimpin DPC Gerindra Salatiga, beberapa anggota BKDS juga ditarik untuk menduduki posisi struktural DPC Gerindra.

Diah Sunarsasi sebenarnya merupakan orang baru dipanggung politik, termasuk politik Salatiga. Kehadirannya dipanggung politik Salatiga adalah ketika secara "ajaib" terpilih sebagai Wakil Walikota Salatiga atas dukungan PDIP karena meninggalnya Walikota H. Totok Mintarto tanggal 9 Februari 2007 dan John Manoppo secara otomatis menjadi Walikota. Perempuan yang secara tiba-tiba muncul dipanggung politik Salatiga ini beralamat di Perum Salatiga Permai Gg III No. 15. RT 02/RW 12 Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga. beliau memegang jabatan wakil Walikota sejak tahun 2008-2011. Ketika ditanyai tentang latarbelakang dirinya yang "awam" politik, dia mengatakan:

> **"Mas, saya punya keinginan untuk menjadi wakil walikota itu disebabkan karena saya ingin membangun Salatiga, suami saya kan orang Salatiga. dan ketika pak John menjadi Walikota akibat pak Totok meninggal, saya diusulkan oleh berbagai pihak untuk maju, walau saya bukan PNS atau orang politik–tapi saya punya pengalaman panjang dengan suami yang sering pindah-pindah tempat tugas, sehingga saya mengerti berbagai karakter masyarakat di tempat tugas suami saya, saya mengerti pembangunan juga. Jadi karena pengalaman itulah akhirnya saya maju dan diusulkan ke DPRD untuk dipilih, dan didukung oleh PDIP yang kemudian menang dengan 17 suara, sedangkan calon dari PAN hanya mendapat 7 suara. Sayangnya waktu ikut pemilihan Walikota Salatiga 2011 yang juga didukung Golkar dan PDIP berpasangan dengan pak Tedy, dengan jargon DIHATI ternyata kalah"**

DIHATI adalah calon pasangan hasil koalisi partai Golkar (yang mengusung Diah) dan PDIP (yang mengusung Tedy) disertai PAN dan PDS. Sebenarnya secara internal partai Golkar telah memiliki mekanisme

perekrutan calon yang pada awalnya menempatkan Rosa Maria Delima Sri Darwanti, SH., M.Si yang memiliki suara mayoritas dan elit Golkar Salatiga, sedangkan Diah Sunarsasi berada pada posisi kedua sekaligus bukan anggota partai Golkar, jadi Diah memiliki dua kekurangan dibanding Rosa. Namun hasil keputusan DPP Golkar ternyata yang didukung sebagai calon walikota Salatiga waktu itu adalah Ir.Hj. Diah Sunarsasi. Hasil keputusan ini kemudian "dijawab" oleh Rosa dengan tetap maju sebagai salah satu calon berpasangan dengan Bambang Soetopo (POROS) yang didukung oleh PKPI dan PPRN. Hasilnya adalah baik DIHATI maupun POROS sama-sama kalah dalam suksesi pemilukada Salatiga 2011 tersebut.

Mantan wakil Wali Kota Salatiga ini memulai kehidupan organisasinya sebagai Ketua Darmawanita di Jati Rogo Tuban tahun 1989–2007, dan Ketua Yayasan Tunas Rimba pada tahun yang sama dan wilayah yang sama pula. Tahun 2004-2005 menjabat sebagai Bendahara Koordinasi Kerjasama Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jawa Tengah, yang ketuanya adalah istri (mantan) Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo; tahun 2010 menjabat Ketua Yayasan Tunas Rimba Jawa Timur. Kemudian tahun 2010–2013 terpilih sebagai Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kota Salatiga, dan mulai tahun 2012–sekarang menjabat Ketua DPC Gerindra Salatiga.[11]

Berdasarkan uraian di atsa, sekalipun berbagai pihak masih menilai bahwa Ir.Hj. Diah Sunarsasi masih "hijau" dalam politik maupun organisasi, namun tindakan beliau teruji sebagai politikus yang perlu diancungi jempol, kemampuannya dalam membuat PDIP mendukungnya dalam pemilihan wakil walikota; menggeser posisi Rosa Maria Delima Sri Darwanti yang *notabene* elit Golkar dalam perebutan pencalonan sebagai walikota 2011 dan

[11] Salah seorang informan yang tidak ingin namanya disebutkan, mengatakan bahwa Rekomendasi Ketua DPC Gerindra Salatiga ke DPP saat itu hanya satu nama yakni Yulianto–Walikota Salatiga yg terpilih tahun 2011, namun tidak tahu mengapa yang "dikembalikan" dari DPP kok malah ibu Diah Sunarsasi yang kalah bertarung dalam Pilkada Salatiga 2011 itu.

kemampuannya merebut kursi ketua DPC Gerindra dan lolos sebagai anggota DPRD Salatiga perlu diperhitungkan dalam arena politik Salatiga kedepannya.

Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE[12]. Perempuan kelahiran Salatiga 20 April 1968 ini adalah seorang olaragawan yang energik. Ibu Woro, begitu sapaan akrab dari kolega atau teman seperjuangannya di Gerindra. Beliau mulai terlibat dibidang olaraga Salatiga sejak tahun 2000–2006 sebagai Ketua Pokmas Tunas Tingkir, tahun 2006-2011 sebagai Ketua PABBSI (Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga) Salatiga periode I, selanjutnya terpilih kembali sebagai Ketua PABBSI periode II, masa bakti 2011-2016. Selain itu, sejak tahun 2009 ibu Woro terlibat aktif sebagai anggota KONI Salatiga sampai saat ini. Selain hobi angkat besi dan binaraga, perempuan berstatus janda (cerai hidup) dengan tanggungan 4 orang anak ini, sejak tahun 2010 sampai sekarang memiliki hobi baru yakni sebagai petinju, yang tercatat sebagai anggota Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Salatiga.

Di Salatiga, perempuan perkasa yang selalu mengenakan jilbab ini adalah seorang pengusaha cukup sukses. Dia memulai kariernya sebagai pengepul kulit Sapi sejak tahun 1990 sampai tahun 2007, selain itu, tahun 1994-2010 mengembangkan bidang usahanya ke konveksi, dan tahun 2004 sampai serakang, membuka usaha yang berkaitan dengan hobinya sebagai olahragawati, yakni fitnes dan senam, dan juga memiliki studio foto.

Perempuan asli Salatiga ini berdomisili di Dusun Kriyan, RT 003/004 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamtan Tingkir Kota Salatiga. Kepeduliannya tentang usaha ekonomi khususnya pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendorong dirinya untuk melanjutkan studi pada Pendidikan Tinggi tahun 2005, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari STIE AMA Salatiga tahun 2009. Selain itu, perempuan lulusan SMA Dharma Putra Salatiga tahun 1987 dalam kesehariannya juga terlibat di LSM Percik Salatiga. keterlibatannya dengan

[12] Wawancara tanggal 30 September 2014, di rumahnya.

Percik dilatari oleh kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat kecil.

Perempuan energik dan pekerja keras yang suka senyum ini, menuturkan bahwa terpilihnya dirinya sebagai salah satu caleg partai Gerindra, kemudian menang, dikarenakan dirinya mampu bekerja keras (pengusaha), berpikir untuk kemajuan partai, dan dalam kesehariannya cukup dekat dengan ibu Diah Sunarsasi–ketua DPC Gerindra Salatiga. Khoirun, BA, yang diwawancarai tanggal 20 September 2014 tentang sosok Hj. Riawan Woro Endartiningrum mengatakan bahwa:

> **"Ibu Woro masuk sebagai salah satu caleg Gerindra sudah melalui tahapan mekanisme perekrutan yang dilakukan partai. Dia terpilih sebagai caleg karena kepeduliannya terhadap masalah sosial, lingkungan, ekonomi masyarakat kecil–beliaukan pengusaha, olahragawan, dan yang terpenting juga adalah beliau memiliki jaringan yang cukup baik dengan LSM khususnya Percik, dan beliau adalah salah satu caleg perempuan Gerindra yang hebat."**

dr. Suryaningsih, M.Kes, adalah salah satu birokrat di Salatiga yang memiliki segudang prestasi dibidangnya. Perempuan kelahiran Salatiga 20 Juli 1956 ini adalah dokter teladan tingkat Kota Salatiga tahun 1992, dan dokter teladan tingkat Karisidenan tahun 1993. Dokter senior ini berdomisili di Tegalrejo Permai V/72, RT 002/009, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, memiliki kepedulian yang tinggi tentang masalah kesehatan. Ketika peneliti berkunjung ke rumahnya tanggal 4 Oktober 2014 untuk melakukan wawancara, kesan pertama yang tampak adalah orangnya ramah, baik hati dan keibuan, sesuai dengan prfesinya sebagai dokter yang memang dituntut untuk selalu ramah terhadap setiap pasien.

Dalam pertemuan itu, satu jam lebih beliau gunakan hanya untuk bercerita tentang profesinya, upayanya dalam membantu masyarakat dibidang kesehatan, membantu dengan tulus dan senyum. Baginya senyum kepada

pasien adalah obat paling mujarab bagi kesembuhan. Katanya "kalau dokter maupun perawat setiap saat ketika bertemu pasien, dituntut untuk harus ramah dan terus tersenyum, sekalipun mungkin lagi ada masalah di rumah, sebab senyum itu akan membuat pasien merasa aman, terlindungi, dan ada aura positif yang muncul mengalahkan sakit derita dan penyakit yang dihadapi pasien".

Kemampuannya yang teruji sebagai wanita kareir dibidangnya, berimplikasi pada jabatan lebih tinggi, yakni sebagai Direktur RSUD Salatiga tahun 2010-2012. Sejak itulah dia membangun hubungan baik dengan partai Gerindra (walau bukan anggota partai), dan berimplikasi pada program penyediaan *ambulance* gratis yang disediakan partai Gerindra baginya untuk membantu masyarakat Salatiga yang membutuhan transportasi kesehatan yang mendadak. Kisah demi kisah hidup yang diuraikannya berakhir dengan sebuah pernyataan bahwa "mungkin dengan pengalaman itulah saya bisa lolos seleksi partai Gerindra untuk menjadi salah satu dari caleg mereka, walau saya bukan anggota partai, termasuk anggota partai Gerindra".

Perempuan lulusan Fakultas Kedokteran UNS tahun 1989, dan Magister Kesehatan (M.Kes) tahun 2003 memiliki segudang prestasi dan pengalaman organisasi, yakni, sejak tahun 2002 sampai sekarang tercatat sebagai Penasehat Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tahun 1990 sampai sekarang menjabat Wakil Ketua TP. PKK Kota Salatiga, dan sejak tahun 2012 sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA) Salatiga. KESIRA merupakan salah satu organisasi sayap partai Gerindra, karena itu, sekalipun tidak tercatat sebagai pengurus DPC partai Gerindra di Salatiga, namun keterpilihannya sebagai Ketua KESIRA adalah ikatan dirinya untuk loyal kepada partai.

Wakil Sekretaris DPC Gerindra, M. Sahibudin Al Amin yang diwawancarai tanggal 24 September 2014, mengatakan bahwa:

> **"Ibu Suryaningsih orangnya baik, ramah, jujur dan bertanggungjawab, makanya beliau diajukan sebagai**

salah satu calon anggota legislatif Gerindra, dan nyatanya beliau terpilih. Jadi dengan terpilihnya beliau maka program kesehatan dari Gerindra akan semakin gencar lagi dilakukan, itulah janji beliau ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat pada saat kampanye. Pesan penting yang hendak kami berikan adalah masyarakat perlu diberdayakan untuk mampu memilih wakilnya dengan dasar program kerja yang mereka lakukan, jangan memilih karena dibayar. Ibu Suryaningsih telah membuktikan itu."

Supriyadi Fatkhi, Sekalipun dikategorikan sebagai salah satu pengusaha sukses, pemilik Wiraswasta UD. Jayawadina, memiliki Pondok Pesantren (PonPes) Al-Madinah, juga seorang tokoh agama Islam, lelaki yang suka senyum ini dalam keseharian hidupnya biasa-biasa saja–sederhana. Ketika bertemu di kantor DPC Gerindra Salatiga tanggal 18 September 2014, beliau menyarankan agar wawancara dilakukan di rumahnya tapi diupayakan sore atau malam hari. Akhirnya kesepakatan berkunjung ke rumahnya terealisasi tanggal 24 September 2014, setelah melakukan kontak lewat *handphone*. Sore itu udara Salatiga terasa cukup segar, apalagi ketika memasuki wilayah Cabean, Kelurahan Magunsari, Kecamatan Sidomukti, tepatnya di RT. 005/001, rumah beliau. Supriyadi boleh dikatakan sangat terkenal di daerah tersebut, sebab statusnya sebagai kiai dan memimpin pondok pesantren. Rumah yang sederhana bagi seorang tokoh agama, Kepala Sekolah MTS Plus dan MTK Plus Al-Madina, sekaligus juga pengusaha, begitu kesan pertama ketika memasuki rumahnya.

Dengan menggunakan *kaos oblong* berwarna putih lengkap dengan peci di kepalanya, beliau menjelaskan berbagai hal tentang dirinya. Lelaki yang ahli ilmu agama ini mengisahkan, selain mengajar dan membina anak-anak asuhannya dipondok pesantren, juga sebagai pendiri dan pembina kelompok tani "Pok Tan Ayam" dan Pok Tan Kambing" pada tahun 2011. Bidang pertanian memang menjadi keahlian lain bagi lelaki kelahiran Magetan, 31

Maret 1979 ini. Kepeduliannya dibidang pertanian dan kelompok tani, menjadikannya sebagai Pengurus Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Salatiga tahun 2009 sampai sekarang.

Dalam paparannya, dikatakan bahwa dunia politik adalah hal baru bagi dirinya, dan dia berjanji akan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat Salatiga atau konstituen baginya. Keputusannya untuk terjun ke politik dilatari oleh pertemuan dirinya dengan ibu Diah Sunarsasi, sebab ibu Diah pernah menjadi Ketua HKTI tahun 2010-2013. Dalam berbagai pertemuan itu, menurut ibuh Diah, dirinya memiliki modal yang besar untuk bisa terjun ke dunia politik. Walaupun demikian, pujian itu tidak dipikirkannya, beliau merasa sudah cukup menjadi Kepala Sekolah, dan kiai di Pondok Pesantrennya.

Namuan demikian, "godaan politik" itu terasa cukup kuat, ketika dirinya tidak kuasa menolak permintaan Diah Sunarsasi untuk duduk dalam struktur DPC Gerindra Salatiga 2012-2015, sebagai salah satu wakil Ketua. Konsekuansi dari "status baru" yang melekat padanya, dia kemudian diajukan sebagai salah satu dari 25 orang calon anggota legislatif partai Gerindra, yang kemudian menang dalam pileg 2014.

Lelaki muda yang *kece* dan sukses ini memiliki riwayat pendidikan dari sekolah yang berbasis agama Islam, hanya pendidikan SD-nya yang tidak berbasis agama, yakni SD Negri Sampung II Magetan, lulus tahun 1992. Tahun 1992-1996 dia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Hidatatullah Surabaya, kemudian lulus. Pada tahun yang sama (1996) menamatkan pendidikannya di MTS Syarif Hidayatullah Cirebon, dan tahun 1999 lulus dari Madrasah Aliah Negri (MAN) Salatiga, kemudian melanjutkan studi di STAIN, tahun 2000-2002 mengikuti pendidikan di Ma'had Abu Bakar UMS Solo sambil pada rentang tahun yang sama (2000-2003) menikuti pendidikan di UNDARIS.

Lelaki berdarah Jawa Timur ini menikah dengan ibu Maharlika, S.Pd.I. Pernikahan mereka kemudian dikaruniai 3 orang anak. Kesederhanaan, kejujuran, dan kerja keras dalam membangun usaha baik dibidang pendidikan

maupun pertanian dan pembinaan kelompok tani telah membawa dirinya terlibat aktif dalam dunia politik sejak tahun 2012. Keterlibatan ini membawa hasil positif dengan mengatarnya sebagai satu-satunya laki laki yang berhasil meraih kemenangan pada pileg 2014, "bersanding" dengan 3 "srikandi" partai Gerindra lainnya di DPRD Salatiga periode 2014-2019.

4.1.2 Strategi Pemenangan: Menjual Citra Aktor Mengalahkan Lawan

Trajektori kehidupan para aktor di atas, sudah sedikit tergambarkan tentang habitus dan juga modal masing-masing aktor. Sekalipun modal (ekonomi) tidak secara rinci dijelaskan, hal ini dikarenakan para aktor keberatan menyebutkan besaran modal ekonomi yang dimilikinya. Namun yang jelas bahwa apabila mencermati *trajektori* aktor dengan modal simbolik dan sosial dimiliki setidaknya–walau tidak secara langsung telah tergambarkan kemampuan modal ekonomi mereka, bahwa rata-rata para aktor habitus dan modal sebagai: politisi (Diah Sunarsasi), pengusaha (Woro dan Supriady), birokrat (Suryaningsih dan Diah Sunarsasi), agamawan (Supriyadi), dan lain sebagainya. Setiap habitus selalu membentuk *hexis* badania setiap aktor atau skema persepsi bagi tindakan aktor.

Fokus bagian ini, selain strategi pemenangan, analisis akan diarahkan pada seberapa besar *political cost*, dan apakah biaya-biaya politik itu dapat pula dikategorikan sebagai *money politic*, yang dilarang Undang-undang pemilu. Realitasnya kampanye menggunakan politik uang tidak diperbolehkan, namun terkadang para calon bersembunyi dibalik biaya politik sehingga politik uang menjadi kabur definisinya (Suwartiningsih, 2006:95). Setiap aktor memiliki strategi politik yang berbeda, walau hampir sama, sebab mereka terpayungi oleh partai Gerindra yang memiliki pola dan mekanisme kampanye. Selain itu, partai Gerindra lewat DPC Gerindra secara tidak langsung juga ikut berperan dalam strategi kemenangan masing-masing aktor. Dikatakan berbeda sebab pada tataran taktik masing-masing aktor dalam "mengamankan" suara pemilihnya memanfaatkan "posisi" modal secara tidak sama. Walaupun pola kampanye mereka hampir sama, yakni: pola *Open House,* kampanye *door to*

door, pola silahturahmi, dan pola kampanye serangan fajar (Suwondo, 2005; Suwartiningsih, 2006).

Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Salatiga, perolehan kursi partai Gerindra merata untuk semua daerah pemilihan, yakni 1 kursi pada masing-masing dapil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Yang Memperoleh Kursi / Menang

No	Nama Calon	Dapil	Jumlah Suara Calon	Jumlah Suara Partai[13]
1	dr. Suryaningsih, M.Kes	Argomulyo	1.111	459
2	Supriyadi Fatkhi	Sidomukti	470	455
3	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Sidorejo	2.444	595
4	Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE	Tingkir	964	392

Sumber: KPU Salatiga, 2014. *Diolah*

Kemenangan ini tentu berkorelasi dengan strategi kampanye yang digunakan sekaligus juga besarnya modal yang dikeluarkan. Selain itu, jumlah pemilih yang memilih untuk mencontreng lambang partai Gerindra tanpa mencontreng nama atau gambar calon, dapat "dibaca" dalam tiga makna: *pertama,* pemilih mungkin belum memahami dengan benar cara pencontrengan, sekalipun yang dilakukan pemilih tidak salah, namun ketika hanya mencontreng lambang partai, maka suara pemilih menjadi tidak bermakna. *Kedua,* tindakan pemilih yang hanya mencontreng lambang partai dapat dimaknai partai Gerindra memiliki pendukung yang loyal pada setiap

[13] Jumlah suara partai disini bukan jumalah keseluruhan suara di dapil tersebut, namun jumlah pemilih yang hanya mencontreng partai tanpa mencontreng nama calon.

dapil. *Ketiga,* apabila keputusan untuk hanya mencontreng lambang partai tersebut adalah keputusan sadar, maka dapat pula dimaknai sebagai tindakan resistensi terhadap setiap calon yang diajukan partai pada masing-masing dapil.

Hasil wawancara yang dengan salah seorang Wakil Sekretaris DPC Gerindra, M.Sahibudin Al Amin, Amd[14], beliau mengatakan bahwa:

> **"3 bulan sebelum hari penyontrengan, DPC dibantu oleh tim ibu Diah[15] telah melakukan pendataan disemua daerah pemilihan. Pendataan berkaitan dengan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya, hasinya dipetakan 3 pola perilaku pemilih, yakni: pemilih loyal, pemilih tidak pasti, dan pemilih galau. Pemilih *Tidak Pasti* adalah kelompok yang telah menentukan pilihannya kepada calon lain, baik calon dari partai Gerindra maupun calon yang bukan dari Gerindra. Pemilih *Galau* adalah kelompok pemilih yang belum pasti menentukan pilihannya kepada calon manapun, sedangkan pemilih *loyal* adalah pemilih yang sudah pasti memilih calon dari Gerindra. Data ini kemudian dipaparkan pada semua calon anggota legislatif Gerindra dengan tujuan mengambil tindakan-tindakan strategis untuk mengamankan pemilih loyal, membujuk dan mempengaruhi pemilih tidak pasti, dan pemilih galau."**

Pertanyaannya adalah bagaimana strategi dan taktik yang dimainkan masing-masing aktor? Mari "berkelana" dengan pola kampanye mereka. **Ir.Hj. Diah Sunarsasi,** boleh dikatakan sangat royal dalam berkampanye, sekalipun

[14] Tanggal 1 Oktober 2014 di rumahnya. Dalam keseharian kerjanya di DPC beliau biasanya dipanggil dengan sebutan Mas Udin, yang berstatus Sekretaris II, cukup dekat dengan ibu Diah Sunarsasi.

[15] Yang dimaksud adalah Tim BKDS

beliau tidak mengatakan secara terbuka besaran modal ekonomi yang dikeluarkan. Dikatakan royal sebab jumlah tim sukses aktor adalah yang terbanyak diantara ketiga calon lainnya. Habitusnya sebagai mantan birokrat dan politisi, membuatnya menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utamanya. Argumentasi ini didasarkan pada fakta jumlah tim sukses yang dinamakan BKDS sebanyak 300 orang untuk "mengamankan" pemilih di Dapil Sidorejo yang berjumlah 37.216 orang. Menurut penuturan ibu Diah, tanggal 15 September 2014, bahwa:

> "tim tersebut bekerja selama 6 bulan, yang dipilah dalam dua tahapan, yaitu:, 3 bulan pertama melakukan konsolidasi tim BKDS dan pembekalan tim tentang arah dan tujuan (visi dan misi-nya), untuk memenangkan pileg; 3 bulan berikutnya tim bekerja untuk pemenangan sampai dengan hari penyontrengan 9 April 2014. Kerja tim selain memetakan perilaku pemilih di lapangan, tim juga membuat baju/kaos kampanye, baliho, spanduk, alat tulis bagi anak-anak, kalender, dan lainnya."[16]

Pola kampanye yang digunakan tim BKDS adalah pola *door to door*, silaturahmi, pola *open house,* dan serangan fajar. Beny Supriyadi[17] yang adalah ketua tim BKDS mengatakan bahwa:

> **"Semua pola kampanye itu dilakukan untuk memenangkan ibu Diah, namun yang paling efektif adalah kolaborasi pola silaturahmi dan pintu ke pintu, selain juga serangan fajar. Sedangkan *open house* sekalipun dilakukan setiap hari di rumah semua anggota tim di Sidorejo, tetapi peminatnya kurang bahkan tidak ada, yang datang hanyalah pemilih loyal (keluarga dekat), jadi pola ini sama sekali tidak efektif. Karena anggota timya banyak, maka *open house* tidak ada sembako dan uang. Kesepakatannya adalah yang datang didata (dicatat) kebutuhan lainnya, yang diberikan untuk tahap itu**

[16] Hal senada juga dikatakan oleh Beny Supriyadi (ketua tim pemenangan) ketika diwawancarai tanggal 3 Oktober 2014, di rumahnya.

[17] Wawancara tanggal 3 Oktober 2014 di rumahnya.

hanyalah kaos, kalender, dan perlengkapan sekolah jika sudah punya anak. Sedangkan kebutuhan lain semisal sembako akan disusulkan, namun sekali lagi tidak efekti. Karena itu, tim yang menjemput bola, mendatangi rumah-rumah, memperkenalkan ibu Diah dan apabila cocok diberikan atribut kampanye dan bantuan biasanya berupa "uang pulsa" yang jumlahnya bervariasi Rp.30.000-100.000, ya ini biaya politik sebab yang kita katakan adalah ini ada sedikit buat beli pulsa, akan menjadi pelanggaran apabila kami katakan ini buat kamu tapi harus pilih ibu ya."

Dengan demikian, apabila dalam kerja tahapan kedua (3 bulan) itu, diandaikan setiap anggota tim diberi dana operasional sebesar Rp. 1.000.000 saja, maka anggaran kampanye yang harus dikeluarkan hanya untuk biaya operasional masing-masing anggota tim adalah sebanyak Rp. 300.000.000, belum termasuk pembuatan kaos, kalender, pengadaan alat tulis, sembako, konsumsi pertemuan, pembayaran saksi di TPS, biaya pulsa dan serangan fajar. Semua biaya-biaya ini dalam pandangan calon dan tim suksesnya dikatogorikan sebagai *political cost*, yang dalam definisinya berbeda dengan *money politic* yang dilarang Undang-undang. Berdasarkan itu, maka secara hukum (Undang-undang) definisi tentang politik uang yakni "pemberian sesuatu barang dengan janji/permintaan untuk memilih orang lain", perlu dipikirkan kembali.

Citra yang dibangun tim BKDS dalam "menjual" calonnya adalah: pemimpin perempuan, jujur, bertanggungjawab, berpengalaman dipolitik maupun birokrat, cantik dan selalu tersenyum, ramah, dan keibuan. Citra ini mengkonfirmasikan pemikiran Pierre Bourdieu tentang modal budaya dan modal simbolik, modal budaya tampak juga dalam penulisan gelar (Ir., Hj). Citra ini "dijual" dengan wadah kalender, kaos kampanye, baliho, spanduk dan lebih pentingnya adalah setiap kali berkunjung ke rumah pemilih citra inilah yang dijelaskan kepada calon pemilih dengan tujuan membangun modal sosial.

Untuk memperkuat "penjualan" citra tersebut, modal ekonomi (biaya politik?) dijadikan pengikat simpul jaringan yang dibangun. Dengan demikian, dalam konteks ini, biaya politik yang dimaknai sebagai akibat dari kampanye, oleh peneliti diibaratkan sebagai strategi yang benar atau baik namun keliru.

Jaringan harusnya dibangun atas dasar *trust* pemilih terhadap kapasitas dan kapabilitas (modal sosial dan simboliknya) aktor, bahwa pemilih membutuhkan sesuatu memang benar, namun pemilih yang cerdas adalah pemilih yang menentukan pilihannya atas dasar rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dan kemampuan memimpin aktor. Baju kaos dan kelender adalah biasa dan tepat jika diadakan, yang tidak tepat adalah "uang "pulsa", jika rekam jejak aktor menjadi pertimbangan, maka biaya politik dapat ditekan seminimal mungkin.

Pemberian perlengkapan sekolah bagi anak-anak usia sekolah memang merupakan tindakan mulia, namun dalam konteks kampanye menjadi tidak tepat sasaran atau dapat dikatakan tindakan pencitraan. Meminjam istilah orang Manado "terlalu makang puji." Tindakan aktor yang memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak akan menjadi mulia, miminjam istilah yang bernada teologis (Kristen) "upahnya besar di sorga" apabila diberikan pada saat/waktu tidak dalam suasana kampanye atau setelah kampanye, maka bantuan itu dianggap benar-benar murni ingin membantu anak-anak yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu. Menjadikan kebutuhan anak sebagai bagian dari politik pengendalian orang tua yang memiliki hak pilih adalah tindakan aktor yang kurang terpuji atau kurang bertanggungjawab, apapun alasannya. Anak usia sekolah tentu "tidak diundang" ke pesta lima tahunan itu, sebab Undang-undang memang tidak menghendakinaya.

Serangan fajar adalah pola kampanye yang juga dilakukan oleh tim BKDS. Sekalipun dikatakan serangan fajar, namun waktu yang digunakan untuk pola kampanye ini tidak hanya subuh saja. Pola ini mulai dilakukan pukul 22.00–05.30, namun dilakukan dengan dua cara berbeda: *pertama,* kolaborasi dengan pola *door to door.* Mendatangi rumah-rumah pemilih yang

masih tidak pasti dan galau, membuat kontrak politik sesaat dengan indikator: "akan pilih siapa?" "diberikan berapa oleh yang bersangkutan?" "kalau saya memberi lebih dari itu mau *gak* merubah pilihan?" kalau yang ditanya bersedia, maka transaksi politik dilakukan dengan menyerakan *fotocoppy* KTP, bahkan KTP yang asli bisa dijadikan jaminan dan tim memberikan amplop, yang masih disertai dengan janji apabila terpilih dan menang akan ditambah lagi. Varian *kedua,* berlanjut ke*ronda* di daerah pemilihan pukul 02.30-05.30 bahkan lebih. Pola kontrak politiknya sama dengan cara pertama, hanya saja pada cara kedua ini masih ditambahkan dengan pertanyaan "tinggal disini atau tidak–alamat KTPnya mana? Masuk daftar pemilih tetap atau tidak, jika yang ditanya beralamat di dapil itu namun belum terdaftar di DPT maka akan dilobi lebih lanjut dan kalau bersediah memilih, transaksi dilakukan. Demikian pula jika yang ditanya adalah warga dapil tersebut tetapi sudah memiliki pilihan, maka tawar-menawar harga dilakukan dan jika ada kesepakatan maka transaksi terjadi. Besaran biaya untuk membeli suara pada serangan 'malam-fajar" ini adalah Rp. 100.000 – 150.000 per suara.[18]

Tim BKDS yang dihidupkan kembali, mengkonfirmasikan adanya kepercayaan *(trust*) yang kuat dari anggota jaringan kepada aktor (Diah Sunarsasi). Dasarnya bisa karena kepentingan (jaringan kepentingan), *power* maupun sentimen (emosi) para anggota untuk memenangkan calonnya. Dalam terminologi Pierre Bourdieu, dapat dikatakan sebagai struktur-struktur yang dibentuk dan struktur-struktur yang membentuk tindakan dan perilaku aktor. Alasan utama kembali menggunakan struktur jaringan lama itu, selain karena telah terbangun norma dan *trust*, BKDS adalah struktur jaringan yang telah mapan. Keberhasilan Ir.Hj. Diah Sunarsasi menjaga keutuhan jaringan (tim BKDS), kemampuan tim dalam kampanye dan "gerakan bawah tanah" dan kemampuannya dalam membangun komunikasi (lobi) dengan tokoh agama

[18] Wawancara dengan Diah Sunarsasi, tanggal 15 September 2014; Beny Supriyadi, 3 Oktober 2014; dan M. Sahibudin Al Amin, 31 Oktober 2014, masing-masing di rumah informan.

dan tokoh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan dan diskusi 2 mingguan (1 kali pertemuan dalam 2 minggu) tentang bagaimana membangun manusia dan infrastrukturnya, berbuah sebagai kemenangan gemilang bagi dirinya, yakni 2.444 suara. Kemenangan ini membuktikan bahwa Ir.Hj Diah Sunarsasi adalah politikus yang mampu memanfaatkan habitus dan modal yang dimilikinya untuk bertarung dalam ranah. Selain itu, Diah Sunarsasi mampu membuktikan bahwa keberadaannya perlu diperhitungkan secara matang oleh lawan-lawan politiknya di panggung politik Salatiga kedepannya.

Supriyadi Fatkhi, pak Kiai begitu sapaan akrab dan sapaan penghormatan dari teman dan sahabatnya, termasuk murud-muridnya. Lelaki yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai Kepala Sekolah dan pemimpin pondok pesantren ini, terlihat biasa-biasa saja, tidak ada antusiasme berlebihan dalam pesta demokrasi politik lima tahunan. Pria yang sebelumnya tidak memiliki rekam jejak di dunia politik ini, mengatakan bahwa:

> **"Mas, tujuan saya masuk ke situ (politik) sama saja dengan tujuan dan harapan saya di sini (pendidikan pondok pesantren). Visi utama saya adalah membantu pendidikan bagi anak tidak mampu, dan mengembangkan sektor pertanian di Salatiga lewat pemberdayaan HKTI. Saya tidak memiliki misi politik yang berlebihan, hanya itu. *Wong,* saya maju aja di*dorong-dorong* oleh teman-teman kelompok tani *kok,* dan kecintaan saya kepada figur Prabowo kalau *gak* begitu mana mau. Kalau mau tanya soal kampanye, jangan ke saya, saya kayaknya tidak pernah kampanye *dhe*, kampanye itukan harus banyak keluar modal, iya *gak* mas. Saya cuma lakukan pertemuan dengan teman-teman kelompok tani saja, itupun saya diundang mereka, dan mereka yang menyiapkan makanan dan minuman kecil buat saya, *klo* tidak percaya tanya aja sama teman-teman. Seingat saya dana yang saya keluarkan hanya Rp 2.000.000 untuk buat 30 baliho, ukuran balihonya juga kecil, uang itu dikelola bapak**

Rustam. Buat baliho saja karena "diejek" teman-teman. Katanya *nyalon kok gak* punya baliho. Tidak ada kaos, tidak ada kalender, tidak ada amplop, tidak ada kemauan *hehehe kan didorong-dorong,* disuruh maju, juga tidak ada sumbangan ke partai, kalau tidak percaya cek aja di data sumbangan kepartai[19]. Tapi *alhamdulillah* menang juga. Modal saya cuma kepercayaan saja, teman-teman dikelompok tani percaya, masyarakat percaya walau yang *milih* hanya 470 suara tapi itu sudah suara terbanyak partai Gerindra di dapil ini. Memang ada masyarakat yang bertanya dan meminta uang, tapi saya jawab saja saya tidak punya uang, maaf ya. Mungkin jawaban itu yang membuat perolehan suara saya cuma itu. Tapi atas kehendak Allah, nyatanya dengan doa saja saya menang."[20]

Masyarakat memang mengharapkan sesuatu dari caleg di wilayah mereka, namun masyarakat (pemilih) tidak memaksa caleg untuk harus memberikan. Karena itu caleg yang memanfaatkan harapan masyarakat itu dapat dikatakan sebagai caleg yang sebenarnya tidak jujur pada kemampuannya sendiri. Kampanye politik memang mengisyaratkan *cost* yang tinggi, begitu yang dikatakan oleh calon-calon anggota legialatif, dan mungkin realitasnya demikian. Namun dalam kasus Supriyadi Fatkhi, asumsi itu bisa dipatahkan, yang dibutuhkan membangun modal sosial, dan ini harus dilakukan jauh sebelum pemilu, itulah rekam jejak, bahkan modal budaya dalam pengertian pencantuman gelar akademik (kesarjaan) juga menjadi tidak

[19] Dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Kampanye Partai Gerindra periode 28 Desember 2013 s/d 2 Maret 2014, ketika dicek oleh peneliti memang benar yang dikatakan Supriyadi, dia tidak menyumbang.

[20] Wawancara dengan Supriyadi Fatkhi, 24 September 2014, di rumahnya.

penting dalam kasus ini. Jadi modal sosial akan mengkonfirmasikan modal simbolik dalam wujud prestise, status, otoritas dan legitimasi.

Ketua tim pemenangan Supriyadi Fatkhi yang ditemui tanggal 27 September 2014 mengatakan keheranannya tentang "bosnya" yang tidak "menjual" diri kepada pemilih. Lebih jelas tentang sosok Fatkhi, dikatakan Rustam bahwa:

> **"Saya sendiri bingung apakah saya ketua tim pemenangan atau apa? Kalau ketua tim anggotanya siapa? Yang jelas tidak ada tim karena tidak ada anggota. Saya diminta tolong untuk buat baliho, katanya yang ukuran kecil saja. Saya dikasih uang Rp. 2.000.000, mana cukup dua juta buat 30 baliho, sekalipun ukuran kecil. Akhirnya teman-teman kelompok tani *nombok*. Kita mikirnya ini orang baik, jujur, dan berpengalaman di organisasi, sekalipun bukan organisasi politik. Lalu kita dukung, kayaknya tidak ada kampanye, pak Kiai cuma bertemunya dengan kelompok tani saja, itupun kita yang undang, pak Kiai menjelaskan apa yang akan dilakukan bagi kelompok tani ke depannya. Jadi beliau itu terpilih karena: beliau sudah lama membina kelompok tani, beliau itu tokoh agama, seorang Kiai, pemimpin pondok pesantren, jujur, ganteng *sich* relatif sajalah, dan baik hati. Yang ditunjukan oleh beliau itu adalah bahwa politik tidak harus mahal."**

Strategi pemenangan yang biasa-biasa saja dimainkan oleh Supriyadi Fatkhi, mirip dengan perempuan berstatus dokter, dan mantan Direktur RSUD Salatiga, **dr. Suryatingsih, M.Kes.** Mantan birokrat ini lebih menonjolkan habitusnya sebagai dokter untuk menarik simpatik pemilih. Sebagai dokter tentu sangat banyak dikenal orang, apalagi program *ambulance* gratis dari

Gerindra yang dikelolahnya menambah modal tersendiri bagi dirinya untuk "laku" dimata masyarakat pemilih.

Ibu dr. Suryatingsih, M.Kes, dari dua gelar kesarjanaan yang dilekatkan pada namanya, jelas mengkonfirmasikan modal budaya dalam terminologi Bourdieu. Citra inilah yang dikemasnya untuk dijual kepada khalayak pemilih. Selain itu modal sosial dan simbolik dimanfaatkan juga ketika memperkenalkan diri kepada masyarakat. Mantan birokrat, direktur RSUD Salatiga, ada modal simbolik yang dijual olehnya. Pertarungan dalam ranah politik (dapil 1. Argomulyo) menjadi menarik, sebab beliau harus bertarung secara internal melawan 5 orang calon lainnya dari Gerindra, dan secara eksternal melawan calon dari partai lain. Bermodalkan kepercayaan diri seorang dokter, Suryatingsih, bertarung dan akhirnya menang dengan peolehan suara 1.111, melebihi perolehan suara nomor urut 1 yakni Suwarno, SE yang hanya memperoleh 954 suara.

Pola kampanye yang dilakukannya adalah memanfaatkan strategi "kampanye kekeluargaan", dari pintu ke pintu menjelaskan pentingnya kesehatan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada warga Argomulyo. Selain itu melakukan pertemuan-pertemuan dengan warga secara umum, dan dana kampanye dalam bentu pertemuan warga itu berasal dari dirinya sendiri. Proses kampanye dilakukan selama dua bulan dan pertemuan dengan warga (dalam 2 bulan tersebut) sebanyak 4 kali. Walaupun demikin, menyangkut dana kampanye dirinya sangat tertutup, tidak pernah mau menyebutkan jumlah uang, sekalipun diminta perkiraannya saja. Lebih jelasnya hasil wawancara dengan beliau adalah:

> **"Saya ini asalnya orang eksekutif, berprofesi dokter, berkecimpung di dunia itu sudah lama. Setiap hari saya bertemu dengan masyarakat entah itu masih di puskesmas atau sampai di rumah sakit, logikannya orang sakit aja saya tolong *kok*. Intinya saya sudah banyak orang kenal. Kesempatan masuk Gerindra datang ketika saya kerjasama dengan partai di bidang kesehatan dan sejak**

itu saya banyak tau tentang politik, visi misi partai dan kader-kadernya. Waktu saya diajak masuk oleh ketua tanpa ragu saya masuk. Kalau soal kampanye saya lebih sering gunakan pintu ke pintu, tapi juga yang lainya, yaitu sering diskusi sama masyarakat tentang bidang kesehatan. Alat kampanye saya cuma baliho *gak* ada yang lain, kalau soal uang kampanye *gak* etis *kan* kalau saya bilang ke mas nanti mas perkirakan saja. Soal uang ini saya diskusi sama ketua kira-kira berapa perorang tapi itu *kan* rahasia perusahaan, *gini aja* mas logisnya ada beberapa orang yang belum yakin memilih saya itu yang saya kasih uang sembako atau uang pulsa *aja*, tapi kalau yang saya tau itu orang saya, *gak* saya kasih."[21]

Proses kampanyenya, ikut "digawangi" oleh tim BKDS, maka anggaran kampanyenya juga cukup besar, namun tidak mau disebutkan. Bedanya aktor ini hanya hanya membuat baliho dan memberikan dana sembako waktu kampanye "kekeluargaan" dan pola kampanye "malam fajar". Dengan demikian, dana kampanye kekeluargaan yang dikeluarkan tim BKDS sebesar Rp. 30.000-100.000, dan dana kampaye "malam fajar" sebesar Rp. 100.000-150.000, diduga juga terjadi dan dilakukan oleh dr. Suryatingsih, M.Kes. Maka strateginya mirip dengan yang dilakukan tim BKDS, yakni menjaga simpul jaringan dengan memanfaatkan modal ekonomi.

Kekuatan dan kemenangan beliau ditentukan oleh besarnya modal ekonomi yang dikeluarkan, sekalipun beliau mengatakan bahwa "dirinya sudah banyak membantu orang dan dikenal orang". Jadi, walaupun ada kemiripan gaya kampanye dengan Supriyadi Fatkhi, namun *ruh* atau daya pengikat kampanye itu berbeda jauh, yang satu memanfaatkan modal sosial, sambunganya diikat dengan *trust,* yang lain memanfaatkan modal sosial yang titik-titik simpulnya dijaga dengan kekuatan uang; yang satu terpilih atas dasar sentiment (emosi) kelompok, yang lain terpilih atas dasar kepentingan

[21] Wawancara dengan dr. Suryatingsih, M.Kes, tanggal 4 Oktober 2014 di rumahnya.

pemenuhan kebutuhan kelompok. Persamaannya ada pada alat peraga kamyanye berupa baliho yang digunakan keduanya.

Berdasarkan analisis strategi pemenangan ketiga aktor di atas, terlihat jelas pola perekat (*bonding*) yang tampak mengikat kepentingan aktor. Kesannya adalah pengikat itu didasarkan oleh gender yang sama, yakni sebagai perempuan. Itulah sebabnya pola kampanye yang dilakukan oleh Ir.Hj. Diah Sunarsasi menjadi sangat berdekatan dengan dr. Suryatingsih, M.Kes, atau pola kampanye dr. Suryatingsih adalah "fotocoppy" pola Diah Sunarsasi dengan sedikit perubahan, dan sama-sama royal dalam berkampanye. Sumbangan kampanye beliau untuk partai adalah sebesar Rp. 3.000.000., jumlah ini lebih kecil dari sumbangan Diah Sunarsasi, yakni Rp. 3.950.000., lebih kecil pula dari sumbangan nomor urut 1 (yang dikalahkannya), yakni Suwarno, SE yang menyumbang Rp. 7.000.000., ke partai.

Terakhir adalah strategi kampanye yang dilakukan oleh **Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE**. Pola kampanye yang dilakukan ibu Woro adalah pola kampanye "kekeluargaan".[22] Menurutnya pola kampanye yang lain, termasuk kampanye terbuka tidak efekti. Beliau lebih senang bekerja sendiri dari pintu ke pintu. Lebih jelasnya dikatkan bahwa:

> **"Saya *pake* tiga pola, yakni pintu ke pintu, silahturami dan serangan fajar, tapi lebih efektif pintu ke pintu karena akan lebih memudahkan masyarakat dalam memahami visi misi saya. Kampanye saya lakukan 2 bulan sebelum pileg, kunjungan itu saya lakukan 2 sampai 3 kali–dalam 2 bulan. Pertama, ketika berkunjung saya memberi payung dan kalender. Kunjungan kedua, biasanya saya kasih baju sama menyisipkan Rp. 50 ribu *hehe.* Juga kepertemuan desa dan berdialog dengan warga, jadi saya manfaatkan pertemuan desa untuk menjelaskan keinginan saya. Selesai pertemuan biasanya saya kasih biaya administrasi desa *palingan* Rp. 300-500 ribu setiap pertemuan desa**

[22] Mirip dengan strategi kampanye Supriyadi Fakthi

yang saya ikuti. Kalau kampanye terbuka bagi saya sudah tidak efek. Saya lebih nyaman kerja sendiri *gak tau* kenapa. Mungkin karena terbiasa kerja sendiri. Masuk Gerindra tidak ada hambatan, waktu saya dibisiki ketua untuk mencalonkan diri, saya mau saja, dan proses rekrutmen saya lolos karena menurut ketua saya berpotensi. Mengenai mengapa kasih uang, mas *kan tau* sendiri masyarakat sekarang itu sudah pintar, *klo* tidak dikasih ya tidak akan dipilih, masyarakat juga sudah *tau* kalau caleg yang tidak kasih uang itu pasti tidak menang, makanya uang menjadi sulit dihilangkan."[23]

Persamaannya dengan Supriyadi Fatkhi adalah sama-sama tidak memberikan sumbangan kampanye ke partai, namun ketika menyongsong Pilpres, kontribusi Hj. Riawan Woro Endartingrum kepada partai (Prabowo) adalah membuat 1000 kaos Prabowo-Hatta, membuat baliho Prabowo-Hatta ukuran 4x6 yang dipasang di 6 Kelurahan, di Kecamatan Tingkir, dan membayar biaya saksi luar sebesar Rp. 110.000 x 85 TPS di dapil 4 Tingkir, serta biaya operasional PAC sebesar Rp. 500.000, sedangkan Supriyadi Fatkhi membantu pencapresan Prabowo lewat doa.

Selain itu, apabila mencermati pernyataan beliau di atas, terlihat jelas persepsi beliau terpengaruh oleh wacana politik yang dibangun oleh para aktor (calon) lainnya, bahwa masyarakat yang dikatakan pintar itu adalah masyarakat yang suka meminta uang dari calon legislatif, anehnya lagi beliau mencoba membangun argumentasi bahwa kalau tidak dikasih pemilih pasti tidak akan memilih. Wacana seperti sebenarnya telah dipatahkan dengan strategi pemenangan Supriyadi Fatkhi, sehingga tidak selalu benar bahwa pemilih akan *ngambek* dan tidak mau memilih jika permintaannya tidak dikabulkan.

Apabila dikalkulasikan modal ekonomi (uang) yang dikeluarkan oleh Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE, yakni uang Rp. 50.000 yang diberikan

[23] Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE, tanggal 30 September 2014, di rumahnya.

ketika berkunjung kedua dengan dikalikan dengan 964 suara yang diperolehannya[24], maka ongkos politik yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 48.200.000. Angka ini mengkin terbilang kecil bagi seorang calon anggota legislatif, namun angkat tersebut belum termasuk dana pembuatan kaos, payung, kalender, baliho, dan dana oprerasional tim suksesnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap trajektori kehidupan dan strategi pemenangan masing-masing aktor di atas, maka dapat diformulasikan bahwa jaringan yang terbangun antara aktor dengan pemilih, terkategorikan dalam tiga pola: *pertama,* jaringan terjadi atas dasar *interest* atau kepentingan. Artinya para pemilih memahami bahwa janji-janji para aktor kebanyakan merupakan janji "aspal" yang jika terpilih akan dengan mudah mereka lupakan. Namun para aktor memaknai wacana itu secara berbeda bahwa masyarakat telah pintar dan kalau tidak diberi uang mereka tidak akan mendukungnya. Perbedaan pandangan antara aktor dengan pemilih itu berimplikasi pada jaringan yang dibangun atas dasar kepentingan dan bersifat sesaat, yang penting sama-sama *happy* saja. Kasus itu terjadi antara lain bagi tiga aktor perempuan yang terpilih. *Kedua*, jaringan yang terbangun atas dasar kekuasaan (*power*) jaringan ini hampir bersinggungan dengan jaringan *interest* di atas, bedanya adalah bahwa *power* dapat diembatkan pada baik aktor maupun istitusi (partai). *Power* dalam pengertian ini bermakna kemampuan seseorang atau institusi untuk mempengaruhi dan mengendalikan sebuah keputusan maupun mempengaruhi dan mengendalikan orang lain untuk menentukan pilihannya. Model jaringan ini awalnya tampak dalam rekrutmen caleg partai, baik Suryatingsih, Supriyadi, dan Woro, ketiganya mengaku diusulkan oleh ketua untuk maju sebagai caleg, kemudian lolos seleksi dan akhirnya terpilih.

[24] Argumentasi kalkulasi dana yang dikeluarkan mungkin dianggap tidak objektif sebab mungkin tidak semua pemilih yang memilih dirinya mendapatkan uang Rp. 50.000 itu. Namun bagi peneliti argumentasi ini dapat dipertanggungjawabkan, sebab beliau pun membuat kaos, payung, dan kalender ketika kampanye dan itu belum dihitung besarannya.

Pola lain dari jaringan yang dibangun atas dasar *power* adalah Ir.Hj Diah Sunarsasi secara otomatis maju sebagai caleg dari Gerindra tanpa mengikuti tahapan seleksi. Bahkan jaringan *power* yang didasari kekuatan modal ekonomi ini telah mengantar dirinya untuk memejang jabatan puncak partai Gerindra di Salatiga, sekalipun ibu Diah awalnya bukan kader Gerindra. Demikian pula kekuatan jaringan dengan basis *power* dimainkan Diah dalam menjaga keutuhan tim BKDS yang dibentuknya sejak tahun 2010 dan kekuatan jaringan itu pula yang mengantarkan dirinya menduduki kursi DPRD Salatiga periode ini. Apabila jaringan berbasis *power* ini diterjemahkan dalam bahasa Bourdieu dapat disejajarkan dengan konsep modal simbolik dan modal budaya, dimana terdapat prestise, status, otoritas dan legitimasi. Karena itu, jaringan berbasis *power* tidak harus selalu negatif, tergantung bagaimana aktor "menggerakan" *power*nya. Hal ini tampak pada kasus Supriyadi Fatkhi yang tampak lebih *soft* memainkan jaringan ini, status dan otoritasnya sebagai kepala sekolah, pengurus HKTI, pembina "Pok Tan" ayam dan kambing, Kiai dimainkan secara lebih lembut dengan citra aktor sederhana guna mendapatkan simpatik dari pemilih.

Sedangkan jaringan *ketiga* adalah jaringan yang terbangun atas dasar *sentimet* (emosi). Jaringan terbangun atas dasar sentimen–emosional, artinya seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk memilih seseorang didasarkan pada tertimbangan pertemanan, hubungan kekerabatan, atau hubungan patron klain. Walau demikian, jejaring yang terbangun atas dasar sentimen biasanya bersifat lebih permanen, sebab antara aktor dan pemilih saling memahami. Pola ini tampak pada kasus Supriyadi Fatkhi, Ir.Hj. Diah Sunarsasi dengan BKDS-nya, termasuk juga dua aktor lainnya, namun pola jaringan ini pada dua aktor lainnya tampak lebih "longgar" belum tentu terbukti.

4.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi

Berdasarkan hasil analisis di atas, tampak tiga faktor utama yang dianggap cukup dominan mempengaruhi kemenangan aktor, yakni: citra

partai, citra aktor dan kemampuan tim kampanye. Lebih jelasnya ketiga faktor ini ajan dijelaskan secara terpisah di bawah ini:

Citra Partai. Partai Gerindra sekalipun dikategorikan sebagai partai baru dalam panggung politik Indonesia, kemampuan pengurus dan kadernya dalam mencitrakan partai ini, khususnya pasca pilpres 2009 harus diakui berhasil. Berbagai upaya pencitraan partai yang identik dengan Prabowo Subianto itu, berhasil mendapatkan simpatik rakyat Indonesia yang kemudian mengantarkan partai ini ke panggung utama politik nasional. Hasil kerja kolektif itu menghantarkan partai Gerindra sebagai partai pemenang ketiga dalam pemilu 2014. Figur dan citra Prabowo Subianto yang "dijual" lewat media pasca pemilu 2009 diduga kuat turut berkontribusi positif terhadap kemenangan partai itu. Tidak hanya pada level nasional, pada level lokal, salah satunya Salatiga, figur Prabowo Subianto, dan upaya keras DPC serta organisasi sayap partai turut menentukan kemenangan dalam pemilu legislatif 2014.

Di Salatiga, semua aktor yang masuk sebagai calon anggota legislatif dan kemudian terpilih mengatakan bahwa mereka memilih bergabung dengan partai Gerindra karena tertarik Prabowo Subianto sebagai tokoh berkharisma. Karena itu, keputusan pemilih untuk memilih dan meloloskan keempat calon anggota legislatif di atas, adalah tidak hanya dikarenakan oleh citra keempatnya, namun juga upaya keras partai dan organisasi sayap partai yang telah memperkenalkan Gerindra kepada masyarakat umum. Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh DPC Gerindra Salatiga sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, tidak bisa dieliminir begitu saja, demikian pula upaya dan organisasi sayap partai terutama TIDAR dan SATRIA yang namanya cukup dikenal dikalangan anak muda Salatiga, khususnya kalangan mahasiswa.

Dengan demikian, kemenangan ini tentu tidak dapat diklaim sebagai kemenangan sepihak milik salah satu aktor, tetapi perlu dimaknai sebagai kemenangan mesin partai Gerindra, sebagai aktor dalam perspektif ANT. Dikatakan demikian, sebab relasi-relasi yang terbanguan berimplikasi pada kemenangan pemilu legislatif 2014, ditentukan juga oleh jejaring yang

"dimotori" berbagai elemen partai, diantaranya adalah figur Prabowo Subianto, iklan-iklan politik partai, kekuatan ekonomi partai, DPC Gerindra lama dan baru, program-program kerja partai, organisasi-organisasi sayap yang juga ikut membesarkan nama Gerindra, konstituen yang loyal, dan termasuk juga tim pemenangan yang dibentuk oleh partai. Akumulasi modal lewat jejaring ini sekaligus memiliki dua makna, yakni: kemenangan bagi aktor manusia (calon legislatif), dan juga kemenangan bagi aktor non-manusia (Partai Gerindra). Dalam konteks inilah *principle of generated symmetry* menjadi bermakna.

Citra Aktor. Sebagus apapun visi misi partai Gerindra kalau tidak didukung oleh aktor-aktor yang baik dan bertanggungjawab, maka sama saja dengan "membuang garam ke laut". Artinya sekalipun pencitraan partai itu telah dilakukan sejak tahun 2009 dan berhasil, namun jika tidak ada aktor yang jujur dan bertanggungjawab untuk mengeksekusi dan *memenejeriali* program dan kegiatan itu sama saja dengan tiada artinya.

Perlu diakui pula keempat calon yang terpilih dari partai Gerindra memiliki citra yang baik bagi para pemilih mereka. Sekalipun argumentasi ini masih harus diperdebatkan. Sebab citra terbaik yang tampak dalam strategi pemenangan yang tidak *neko-neko* dalam "menjual" kesederhanaan, kejujuran, dan kepemimpinan yang kuat hanyalah Supriyadi Fatkhi, yang diikuti oleh dr. Suryaningsih, M.Kes, kemudian Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE dan selanjutnya Ir.Hj. Diah Sunarsasi. Argumentasi ini dibangun atas dasar logika pemanfaatan modal sosial, simbolik, budaya dan ekonomi yang dimiliki masing-masing aktor. Namun apabila logika citra aktor ini dibalik dengan asumsi pemanfaatan modal ekonomi, simbolik, budaya dan modal sosial, maka yang tampak menempati posisi teratas adalah Ir.Hj. Diah Sunarsasi, diikuti Hj. Riawan Woro Endartiningsih, SE, kemudian dr. Suryatiningsih, dan selanjutnya Supriyadi Fatkhi.

Dalam setiap realitas sosial, logika citra aktor ini bisa diterima sebagai kebenaran pada dirinya dalam realitas sosial tertentu. Artinya strategi pemanfaatan modal oleh aktor untuk memperebutkan dan mengakumulasikan modalnya di dalam rahan pertarungan adalah wajar dan benar. Sebab tujuan

utama pertarungan itu adalah pengakumulasian modal. Walaupun demikian, keputusan perlu dibuat untuk menentukan posisi tentang strategi mana yang lebih bermanfaat dan tidak mengakibatkan *anomi*, atau dengan kata lain strategi yang digunakan tidak berujung pada tercabiknya harmoni. Berdasarkan pemikiran ini, maka bagi peneliti logika pertama, yakni membangun modal sosial atas dasar *trust* untuk merebut dan mengakumulasikan modal-modal dalam ranah. Sebab jika logika pemanfaatan modal ekonomi yang diutamakan, maka pengakumulasian modal dalam ranah bisa berujung pada keputusan mengambil hak orang lain, atau dalam bahasa yang lebih tegas aktor (mungkin) akan korupsi dengan tujuan akumulasi modal bisa terwujud.

Tim Kampanye. Pemanfaatan modal sosial berbasis *trust* berimplikasi pada kurangnya modal ekonomi yang dipertarukan dalam ranah, sehingga tuntutan akumulasi modal-modal lain bisa dilakukan tanpa kebingungan dan menyimpang dari aturan. Peran tim kampanye atau tim pemenangan dirasakan cukup dominan dipakai oleh ibu Ir.Hj. Diah Sunarsasi, dikuti ibu dr. Suryaningsih, M.Kes, dan kemudia ibu Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE, sedangkan untuk Supriyadi Fatkhi peran tim pemenangan dalam strategi kampanyenya hampir tidak ada, dia lebih memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya. Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh tim BKDS cukup kuat memberi kontribusi terhadap kemenangan setiap calon dan juga kemenangan partai Gerindra. Strategi pemetaan perilaku pemilih yang dilakukan BKDS perlu diapresiasi sebagai strategi yang berhasil, tepat guna. Pemetaan perilaku pemilih menjadi: pemilih *loyal*, pemilih *tidak pasti* dan pemilih *galau*, adalah strategi menarik yang perlu diadopsi tidak saja oleh partai politik lainnya, namun perlu juga oleh pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Setidaknya dengan pola pemetaan pemilih seperti itu, baik partai politik, pemerhati pemilu maupun pemerintah (KPU) dapat dengan mudah melakukan pendidikan politik bagi warga. Dengan pola seperti ini, golongan putih (golput) dalam pemilu bisa ditekan atau diminimalisir, dan partisipasi

dalam pemilu bisa meningkat. Sekalipun demikian, peneliti merasa perlu untuk melakukan kritik bagi DPC Gerindra Salatiga, sebab data tentang jumalh pemilih dengan tiga kategori itu ternyata tidak terdokumentasi dengan baik oleh DPC. Beberapa kali peneliti bermaksud meminta data ini namun tidak pernah ditemukan dalam berkas (dokumen) mereka. Wakil Sekretaris DPC Gerindra yang ditemui mengatakan bahwa "data tersebut langsung didistribusikan ke tim di lapangan dan (mungkin) belum terdokumentasi, soalnya hanya untuk kepentingan pemenangan saja, atau berupa data tambahan saja". Walaupun demikian, bagi peneliti pola pemetaan pemilih yang dilakukan oleh Tim Kampanye BKDS perlu mejadi acuan bagi istitusi pemerhati pemilu.

5. KESIMPULAN

Bahwa strategi pemenangan calon legislatif terpilih dari partai Gerindra dilakukan dengan memanfaatkan, baik habitus maupun modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik yang dimiliki para aktor. Sekalipun demikian, pemanfaatan modal oleh para aktor untuk memenangkan kursi DPRD Salatiga dalam pemilu legislatif 2014, tampak dalam dua pola, yakni: *pertama,* menggunakan kekuatan modal ekonomi, budaya, dan simbolik dalam membangun jaringan guna mendapatkan pengakuan dan legitimasi pemilih untuk menambah dan mengakumulasikan modal-modal yang tersebar dalam ranah (*field*) pemilu, berupa kursi DPRD. Pola ini tampak dalam strategi pemenangan Ir.Hj. Diah Sunarsasi, dr. Suryatiningsih, M.Kes, dan Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE. Kesamaan pola ini dikarenakan persamaan gender perempuan, dan menggunakan tim sukses yang sama, yaitu BKDS. *Kedua,* adalah bahwa strategi pemenangan dilakukan dengan cara pemanfaatan modal sosial (jaringan) berbasis *trust*, simbolik, budaya, dan ekonomi untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi pemilih untuk menambah dan mengakumulasikan modal yang tersebar di dalam *field* pemilu. Pola ini tampak digunakan oleh Supriyadi Fatkhi, satu-satunya lelaki dari partai Gerindra yang

menang dalam pertarungan memperebutkan kursi DPRD, dengan pola kampanye hampir tanpa mengeluaran modal ekonomi.

Selain itu, beberapa faktor dominan diantaranya: faktor citra partai Gerindara dan "kebesaran" nama Prabowo Subianto, faktor citra aktor yang dikemas secara *apik* berdasarkan modal yang dimiliki, dan faktor tim kampanye atau tim pemenangan, ditemukan turut mempengaruhi strategi pemenangan aktor. Khusus untuk faktor ketiga ini hanya ditemukan, berlaku dan digunakan oleh ketiga aktor perempuan yang menang, sedangkan Supriyadi Fatkhi tidak mengandalkan tim pemenangan. Walaupun demikian, upaya tim BKDS dalam memetakan perilaku pemilih menjadi: pemilih *loyal*, pemilih *tidak pasti*, dan pemilih *galau* perlu diapresiasi dan diadopsi oleh pemerhati pemilu untuk melakukan pendidikan politik yang tepat sasaran.

Setiap realitas sosial adalah ranah, pemilu adalah ranah pertarungan aktor sekaligus pengakumulasian modal. Kemenangan sebagai wujud akumulasi modal dalam *field* pertama telah selesai, namun bukan berarti akumulasi modal ikut selesai. Akumulasi modal aktor akan berlanjut pada ranah berikutnya, yakni ranah DPRD dan secara luas pemerintah daerah Salatiga. Dalam konteks seperti ini, maka strategi pemenangan yang tampak dalam dua pola di atas akan diuji dengan janji para aktor, tetapi kecenderungan akumulasi modal ini memerlukan penelitian lanjutan dalam perspektif pemenuhan janji kampanye aktor ketika pemilu.

Berdasarkan kesimpulan di atas, catatan penting bagi pemikiran Pierre Bourdieu adalah bahwa pemanfaatan habitus dan modal aktor sebagai "taruhan" dalam *field* untuk kemudian kembali diakumulasikan perlu ada nilai dan norma yang menuntun proses itu. Hasil analisis yang tampak dalam dua pola strategi di atas memperlihatkan bahwa penekanan pada penggunaan modal tertentu sebagai basis strategi pengakumulasian modal, dalam perspektif tematik Bourdieu adalah wajar dan perlu diterima. Aktor "di tangan" Bourdieu seolah aktor yang bebas, sebebas-bebasnya. Bagi peneliti, berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, catatan terhadap pemikiran Pierre Bourdieu menjadi relevan. Bahwa aktor perlu dituntun oleh

pertimbangan nilai kejujuran dan keadilan dalam mengakumulasikan modal-modalnya.

Bagi para aktor yang bertarung dalam ranah, dalam hal ini pemilu, strategi pemenangan yang dilakukan perlu didasarkan pada pemahaman bahwa setelah pengakuan dan legitimasi didapatkan, akumulasi modal tidak perlu dipaksakan sampai pada tahap tindakan melanggar aturan, hanya kerena bertujuan mengembalikan modal. Untuk itu, disarankan agar dalam ranah pertarungan, yang perlu diutamakan adalah modal sosial berbasis *trust.*

Kepada pemerintah, disarankan perlu kiranya melakukan pembahasan kembali tentang makna *money politics* yang telah dikaburkan dengan konsep *political cost*. Sebab pengaburan konsep ini berimplikasi pada perilaku politik aktor-aktor yang "bertarung" dalam pesta demokrasi lima tahunan, untuk melakukan apa saja yang penting menang, termasuk tindakan politik uang asalkan tidak disertai dengan janji/ungkapan/ajakan untuk memlih dirinya atau calon tertentu. Definisi yang jelas dan terang tentang *political cost* dan *money politics* perlu segera disepakati.

Bagi mereka yang hendak melanjutkan penelitian dengan topik serupa, disarankan untuk fokus pada: a). Realisasi janji kampanye aktor terpilih ketika mengunakan strategi pemenangan dengan dua pola yang ditemukan dalam penelitian ini; b). Makna *money politics* dan *political cost* dalam pemilu; c). Pertarungan strategi pemenangan antara caleg dalam satu partai; d). Strategi kampanye dengan penyediaan atau mengadaan perlengkapan sekolah bagi anak usia sekolah; dan e). Pandangan Caleg tidak terpilih tentang strategi pemenangan Caleg terpilih.

Daftar Pustaka

Agusyanto, R. 2007. *Jaringan Sosial Dalam Organisasi* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Alam, Tunggul, Wawan. 2003. *Demi Bangsaku: Pertengkaran Bung Karno vs Bung Hatta.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Apter, David, 1988. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES, PT. Kincir Buana.

Basri Alvin, 2013. *Evaluasi Bauran Pemasaran Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada: Studi Kasus Pasangan Ir.Hj. Diah Sunarsasi–Milhouse Teddy Sulistio, SE, dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011.*

Bungin, Burhan, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : *Aktualisasi Motodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bahari, Rachmad 2001. *Partai dan Kita; Petunjuk Praktis Memahami Partai Politik.* Jakarta: Institute for Policy and Community Developmet Studies (IPCOS).

Budiardjo, Meriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik.* Jakarta: PT. Gramedia.

_____, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cipto, Bambang. 2000. *Partai Kekuasaan dan Militerisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahl, Robert, A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dieter Klingemann Hans, dan Richard I. H. 1999. *Partai Kebijakan dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Fashri, Fauzi, 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol:Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu***,** Yogyakarta: Juxtapose.

Haryatmoko, 2003. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Lansdasa Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu,* Majalah BASIS, Nomor 11-12 Tahun Ke-52, November-Desember, 2003.

Ihalauw, John. 2003. *BangunanTeori*. Salatiga: SatyaWacana University Press.

Ingelson, John. 1993. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Irsyam, Mahrus & Lili Romli. 2003. *Manggugat Partai Politik: Seri Buku Politik.* Jakarta: LIP FISIP UI.

Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Menuju Demokrasi.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Latour, Bruno. 2005. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. New York: Oxford University Press Inc.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Law, John, 1994. *Organizing Modernity.* Blackwell: Oxford and Cambridge

Leclerc, Jacques. 2011. *MENCARI KIR: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka,* Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Maanen, Hans Van, 2009. *How To Study Art Worlds: On The Societal Functioning, Of Aesthetic Values*. Amsterdam: Amsterdam University Press

M. Anggorowati (2005) *Studi tentang Implementasi Mesin Scanner pada Sensus Penduduk 2000 melalui Analisis Pembingkaian Relasi Sosioteknis*. Laporan Tesis, Program Magister Studi Pembangunan, ITB.

Moleong, J. Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Nursal, Adnan, 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu : Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ritzer George dan Goodman J. Douglas. 2004. *Teori-Teori Sosiologi Modern,* Edisi terbaru McGraw-Hill

Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2009. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, Edisi Terbaru, cetakan ketiga.

Rissy Y. W. Yafet. 2000. *Dukungan Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Umum 1999: suatu studi di desa Candirejo Kab. Semarang.* Salatiga: Tesis Program Pascasarjana Magister Pembangunan, UKSW.

Salim, Agus, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* Tiara Wacana. Yogyakarta.

Sanit, Arbi. 1997. *Partai Pemilu dan Demokrasi.* Yogyakarta: PustakaPelajar.

Schulte Nordholt, 1973. Nico, *Metodologi dan Metodik Sosiologi*. LPIS UKSW,

Suwondo, Kutut, 2005. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Civil Society Di Aras Lokal.* FISIPOL – UKSW, Salatiga.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualtatif,* Bandung: Alvebeta.

Sukarna. 1977. *Sistem Politik.* Bandung: Alumni.

Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik*. Jogjakarta: IrCiSoD.

Suwartiningsih, Sri. 2006. "Pendidikan Politik dan Masa Depan Bangsa (Sebuah Refleksi Pengalaman Kegagalan Seorang Caleg)." Dalam *Dinamika Sosial Pendidikan Indonesia.* Jurnal Kajian Sosial Interdisipliner, Vol. XXIV, No. 70, Januari 2006. Salatiga: Yayasan Bina Darma dan UKSW.

Syafiie, Inu Kencana & Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Takwin, Bagus, 2003. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu,* Yogyakarta: Jalasutra,

_____, 2006. "Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup." Dalam *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, Yogyakarta: Jalasutra.

Upe, Ambo, 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer : Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.* Prestasi Pustakaraya. Jakarta.

Widjadjanto, Loehoer. 2007. *Bangunan Teori dan Metodologi Penelitian.* Salatiga: Fakultas Ekonomi UKSW.

Wellman, Barry. 1983. "Network Analysis: Some Basic Principles." Dalam R. Collins (ed.) *Sociological Theory*. Vol.1, hal. 155-200.

Daftar Perundang-Undangan:

Undang-Udang (UU) Nomer 31. tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 8 tahun 2008. Tentang Pemilu